

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 ini.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Bayan
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK,

Syahrul Bayan
NIP. 197906071998101002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Disusun	11 Dokumen
	Jumlah Dokumen Layanan Data Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Dokumen
	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	1.100 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Output 1: Layanan Umum	Rp 513.701.000
Output 2: Layanan Data dan Informasi	Rp 609.993.000
Output 3: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 117.140.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 113.900.000
Total	Rp 1.354.734.000

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK,

Syahrul Bayan
NIP. 197906071998101002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Disusun	11 Dokumen
	Jumlah Dokumen Layanan Data Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Dokumen
	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	1.100 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
Layanan Umum	513.701.000	119.460.000	394.241.000
Layanan Data dan Informasi	609.993.000	125.289.000	484.704.000
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	117.140.000	63.146.000	53.994.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
Layanan Perkantoran	143.900.000	19.628.000	124.272.000
Total	1.384.734.000	327.523.000	1.057.211.000

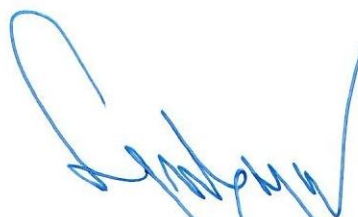
Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK,



Syahrul Bayan
NIP. 197906071998101002